

EVALUASI PROGRAM ANGKUTAN CERDAS SEKOLAH (ACS) BERBASIS APLIKASI DI KABUPATEN PONOROGO

Mario Kushadianto

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
mariokushadianto@gmail.com

Dr Weni Rosdiana S.AP, M.AP

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
wenirosdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Program Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) Berbasis Aplikasi adalah Program yang diciptakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo sebagai upaya untuk mempermudah para pelajar dalam mengakses angkutan sekolah secara gratis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi Program Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) Berbasis Aplikasi Di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Tahap analisa data kualitatif dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program ACS berbasis aplikasi di Kabupaten Ponorogo masih belum memenuhi kriteria efektivitas yang ditunjukkan. Pada segi efisiensi sudah baik program angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi. Dalam hal kecukupan masih belum tercukupi karena terbatasnya armada serta belum ada Standar Oprasional Prosedur (SOP) tentang layanan angkutan cerdas sekolah. Dalam hal perataan masih belum merata, karena masih banyak sekolah yang belum memperoleh akses layanan program ACS. Pada responsivitas program angkutan sekolah mendapat respon yang positif dari pengguna angkutan ACS serta juga mendapatkan respon yang baik dari tingkat provinsi jawa timur yaitu mendapatkan penghargaan sebagai Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) pada 2018. Dari ketepatan program ACS ini sudah tepat sasaran karena memang di peruntukan untuk mereka para pelajar yang khususnya belum memiliki surat izin mengemudi (SIM). Diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo segera melakukan usaha dalam penambahan armada ACS, menambahkan fungsi ACS sehingga tidak hanya sebagai program angkutan antar jemput sekolah saja tetapi juga sebagai bagian dari fasilitas untuk pendidikan, program ACS di harap menjalin kerjasama dengan pihak terkait supaya didalam programnya mendapat prioritas utama, perlunya dibuatkan Standar Oprasional Prosedur (SOP).

Kata kunci : Pelayanan Publik, Evaluasi Program, Angkutan Cerdas Sekolah (ACS)

Abstrak

Abstrak"Application-based school Intelligent Transport (ACS) program is a Program created by the District Transportation Agency Ponorogo as an effort to facilitate students in accessing school transportation for free. The purpose of this research is to describe the evaluation of the school intelligent Angkutan Program (ACS) based on the application in Ponorogo district. This research is a qualitative descriptive research. The stage of qualitative data analysis is conducted through data collection, data reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions. The research showed that the ACS Program based on the application in Ponorogo District still does not meet the effectiveness criteria indicated. In terms of efficiency is already a good intelligent school based transport program application. In terms of adequacy is still not fulfilled due to the limited fleet and there is no standard oprational procedures (SOP) about the school Smart transport Service. In terms of alignment is still not even evenly, because there are still many schools that do not have

access to the ACS program services. At the responsiveness of the school transport program received a positive response from the ACS transport users as well as getting a good response from the East Java provincial level was awarded as the Top 25 Public Service Innovation Competition (Kovablik) in 2018. From the time of the ACS program has been targeted because of the allocation for those students who do not have a driver license. It is hoped that Ponorogo District Transportation Agency immediately made efforts in the addition of the ACS fleet, adding the ACS function so that not only as a school shuttle transportation program but also as part of the facility for Education, the ACS program in the hope of establishing cooperation with the related parties so that in the program got the first priority, the need for the oprational procedures (SOP).

Keywords: Public Services, Program evaluation, School Intelligent Transport (ACS).

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu elemen penting dari suatu daerah. Fasilitas transportasi memiliki potensi untuk mengendalikan arah dan besarnya perkembangan daerah sehingga perencanaan transportasi memiliki posisi khusus dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan wilayah selalu dikaitkan dengan aktivitas masyarakat yang semakin bertambah. Aktivitas masyarakat tersebut akan membentuk suatu pola pergerakan yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Artinya jika sektor transportasi ini tidak di perhatikan dengan baik maka dapat dipastikan pengembangan serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak dapat dinikmati secara optimal untuk seluruh masyarakat. Penataan sistem transportasi harus dilakukan secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi nasional agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, yang layak dengan biaya murah sehingga dapat terjangkau dan mudah di akses oleh seluruh masyarakat.

Laju tingkat konsumtif penduduk akan tersedianya kendaraan bermotor, menjadikan transportasi bertambah dari tahun ke tahun sehingga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam kenaikan tingkat laju angka kecelakaan lalulintas yang di sebabkan kendaraan bermotor. Tingkat kecelakaan bermotor sendiri semakin marak terjadi di kalangan para pelajar, hal tersebut menjadikan pemerintah daerah mengupayakan untuk mengatasi masalah kecelakaan lalu lintas dikalangan pelajar tersebut, yang tentunya dengan cara mereka sendiri yang salah satunya adalah dengan menciptakan sebuah inovasi layanan khususnya di bidang transportasi khususnya di bidang transportasi pendidikan.

Di Indonesia sendiri penerapan inovasi dalam sektor publik telah dikembangkan pada

berbagai sektor, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, dan lain-lain. Inovasi dalam sektor publik di Indosnesia telah mengubah karakteristik organisasi publik yang rigid, kaku, dan cenderung status-quo menjadi sistem yang lebih luwes dan dinamis menurut Eprilianto dkk (2019). Inovasi khususnya di bidang pendidikan sendiri menjadi sangat penting untuk terus dikaji, diaplikasikan dan dikomunikasikan pada seluruh unsur yang terlibat dalam pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan di dalam lingkungan pendidikan. Menurut Surya Shandra (2016:2) dalam penelitiannya yang berjudul evaluasi program bus sekolah di Kota Surabaya pemerintah juga harus wajib memikirkan layanan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya ialah layanan transportasi yang khusus untuk para pelajar. Transportasi tidak bisa dipisahkan dengan para pelajar, layanan transportasi digunakan pelajar untuk beraktivitas ke sekolah.

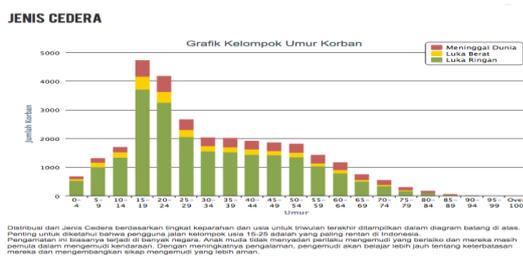
Faktor yang mempengaruhi mengapa perlu diadakannya inovasi transportasi di bidang pendidikan yaitu menurut Heelan dkk (2013:1) kendala yang sering timbul adalah jarak antara rumah dan sekolah terlalu jauh, selain itu juga mengenai lalulintas dan keselamatan untuk pergi ke sekolah serta faktor cuaca yang menyebabkan para orang tua tidak membiarkan anaknya secara aktif pergi ke sekolah sehingga hal tersebut menjadi sorotan utama untuk perlunya pembuatan sebuah alat transportasi untuk pergi ke sekolah. Menurut Oktavinus (2015:1) alat transportasi angkutan umum juga berfungsi agar masyarakat yang sering membawa kendaraan pribadi dapat berpindah ke alat angkutan umum sehingga dapat meminimalisir tingkat kecelakaan dan kemacetan.

Berdasarkan penelitian Raoniar dkk: (2016:2) dalam peelitian *Public Transport Performance Evaluation Techniques -A Review*.

Untuk memenuhi permintaan sistem transportasi umum yang lebih baik, harus ada usaha untuk membangun dan mengembangkan teknik inovasi transportasi yang sudah ada, sehingga sistem transportasi umum yang aman, nyaman dan canggih dapat tercipta. Dalam hal ini, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap modal transportasi umum. Baik dari segi fungsi, kegunaan serta dampak terhadap kalangan masyarakat.

Dari berbagai faktor di atas faktor yang paling di soroti adalah tentang kecelakaan. Banyaknya tingkat angka kecelakaan yang terjadi dikalangan para pelajar sehingga menjadi faktor utama mengapa pentingnya membuat transportasi di bidang pendidikan. Berikut adalah data tentang kecelakaan lalulintas di Indonesia yang dapat dilihat dari grafik di bawah ini.

Grafik 1.1
Tingkat Kecelakaan Di Indonesia



Sumber: Kotlantas 2017

Berdasarkan data grafik di atas terlihat usia 15-20 tahun merupakan yang paling sering mengalami kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas pada usia muda di sebabkan karena masih rendahnya persepsi mereka terhadap risiko bahaya yang ada di jalan raya. Pengendara berusia muda lebih sering menempatkan diri mereka pada situasi berbahaya misalnya dengan mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, menerobos lampu merah, tidak menggunakan alat keselamatan berupa helm serta masih belum memiliki lisensi mengemudi atau SIM.

Angka Kecelakaan di Jawa Timur sepanjang tahun 2019 Dari data Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim mengalami penurunan, penurunannya sebesar 17,59% atau menurun 4.279 kasus kecelakaan. Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan, saat Anev Akhir Tahun Polda Jatim

menerangkan penurunan ini terjadi karena tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayahnya juga menurun. Dari data di tahun 2018, tercatat ada 24.330 kasus kecelakaan. Rinciannya, ada 4.966 orang yang meninggal dunia, dengan 750 orang luka berat dan 32.053 korban luka ringan. Di 2018, tercatat kerugian materi mencapai Rp 30 miliar. Sedangkan di tahun ini, angka kecelakaan turun menjadi 20.051 kasus. Ada 3.918 korban meninggal dunia, 619 orang luka berat dan 26.353 korban luka ringan.

Angka kecelakaan khususnya di kabupaten Ponorogo sendiri pada tahun 2019 tercatat yaitu sebanyak 762 kasus kecelakaan lalulintas, 130 orang dinyatakan meninggal dunia, ada juga korban tabrak lari sebanyak 11 kejadian, laka selip sebanyak 35 kejadian, dan kecelakaan pengaruh alkohol sebanyak 5 kejadian dan sisanya dinyatakan luka berat dan luka ringan. Sedangkan laka lantass yang melibatkan pelajar selama triwulan pertama tahun 2019 sebanyak 41 kasus. Kanit Laka Satlantas Polres Ponorogo, Iptu Badri menjelaskan presentase kejadian laka lantass tahun 2018 dengan tahun 2019 naik sebanyak 6,42%, korban meninggal dunia naik 42, 86%, korban luka berat turun 62,5% dan luka ringan naik 2,89%.

Kabupaten Ponorogo mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 870.705 jiwa, selain itu kabupaten Ponorogo juga memiliki jumlah sekolah dan pelajar yang banyak seperti pada tabel berikut.

jumlah sekolah dan jumlah pelajar di kabupaten Ponorogo tahun 2019

Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Pelajar
SD	701	66.333
SLTP	185	25.765
SLTA	94	9.211
SMK	46	14.980
Jumlah	1.026	116.289

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Ponorogo

Berdasarkan data diatas mengenai jumlah pelajar dan tingkat kecelakaan yang tinggi di kabupaten Ponorogo maka Pemerintah daerah mengupayakan untuk mengatasi masalah

kecelakaan lalu lintas dikalangan pelajar tersebut sehingga dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo menciptakan suatu program penyelenggaraan angkutan sekolah gratis dengan nama Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) yang berbasis aplikasi. Layanan Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) adalah layanan angkutan sekolah gratis berbasis aplikasi yang dapat diunduh dengan mudah di smart phone android.

Selain itu, peningkatan ACS dari angkutan reguler menjadi berbasis aplikasi adalah untuk mempermudah siswa dalam mengakses ACS dan mempermudah pengawasan orang tua terhadap armada ACS. Dari segi pembinaan aplikasi ini dapat mempermudah Dinas perhubungan dalam memantau driver ACS yakni dengan mengalihkan rute bila terjadi kepadatan atau kelengangan. Layanan Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) berbasis aplikasi telah diresmikan pada awal bulan Maret 2018 lalu dan diberi nama ACS Ponorogo. Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan sebagai apresiasi atas kesuksesan program tersebut, aplikasi angkutan cerdas sekolah (ACS) berbasis aplikasi di Kabupaten Ponorogo mendapat penghargaan dengan meraih Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Tingkat Jawa Timur 2018 kategori Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien dan Berkinerja Tinggi. Angkutan Cerdas Sekolah berbasis aplikasi sendiri mempunyai beberapa tujuan utama yaitu pertama mengurangi beban lalu lintas pada waktu *peak* pagi (06.00 – 07.00), tujuan yang ke dua yaitu untuk menekan tingkat pelanggaran tertib berkendara yang dilakukan oleh pelajar dan yang terakhir yaitu untuk menekan tingkat kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar. seperti yang di kemukakan melalui wawancara dengan bapak Djunaidi (kepala Dishub Kabupaten Ponorogo) :

“Sebenarnya angkutan cerdas sekolah ini di buat untuk beberapa alasan utama yang pertama mengurangi padatnya arus lalu lintas saat berangkat dan pulang sekolah, yang kedua untuk mengurangi banyaknya pelajar SMP yang berangkat kesekolah dengan mengendarai sepeda motor padahal kalau dilihat dari usia pelajar SMP, mereka belum saatnya menggunakan kendaraan bermotor, karena mereka juga belum punya SIM, dan yang terakhir yang ke tiga untuk mengurangi

tingginya angka kecelakaan lalu lintas, di ponorogo itu mas kecelakaan rata-rata kebanyakan korbannya di usia produktif yang artinya kecelakaan di dominasi oleh kalangan pelajar SMP sampai SMA. Sedangkan untuk Aplikasi itu sendiri digunakan untuk memudahkan para pelajar itu sendiri, karena mereka dapat memantau angkutan mana yang mereka akan naiki serta mereka juga dapat mengetahui dimana posisi angkutan yang mereka akan naiki, sehingga mereka tidak usah menunggu lama atau khawatir bawasannya angkutan tersebut sudah berangkat atau belum. selain itu kegunaan aplikasi bukan hanya sekedar untuk mengetahui dimana posisi angkutannya tetapi juga sebagai alat pengawasan atau pemantau untuk para armada ACS, karena kalau kita di suruh untuk mengawasi di 26 trayek terlalu sulit dan kita tidak ada tenaganya, belum juga kalau kita menyuruh orang tentunya kita juga harus memberi dana ke mereka jadi dengan aplikasi ini pengawasan akan lebih mudah dilakukan.”

Salah satu masalah yang timbul di dalam layanan Program Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) berbasis aplikasi seperti yang di utarakan diatas, dimana program Angkutan Cerdas Sekolah ini masih belum menjangkau ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ponorogo, hanya sebagian kecil sekolah yang di lewati oleh Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) ini. Seperti yang di katakan oleh bapak Wibowo, S.sos (Penanggung Jawab Layanan Angkutan Cerdas Sekolah)

“Kalau masalah tentunya pasti ada mas mengenai angkutan sekolah ini, salah satunya yang utama yaitu kita masih belum bisa menyentuh keseluruhan sekolah yang ada di Kabupaten Ponorogo hal tersebut dikarenakan pertama kita masih kekurangan armada kita sulit menemukan orang yang memiliki angkutan yang berjenis atau ber tipe Angkodes, walaupun ada terkadang sudah tidak layak jalan, jadi kita kesulitan pada penyediannya mas, walaupun kita menyewa angkutan yang lebih tinggi tipenya kita juga memikirkan terbatasnya anggaran,”

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas tentang masalah-masalah yang timbul, maka perlu diteliti mengenai Evaluasi program Angkutan Cerdas Sekolah di Kabupaten Ponorogo perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait “**Evaluasi Program Angkutan Cerdas Sekolah Berbasis Aplikasi Di Kabupaten Ponorogo**”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori William Dunn adapun kriterianya memiliki 6 poin penting yaitu terdiri dari Efektivitas (*effectiveness*), Efisiensi (*efficiency*), Kecukupan (*adequacy*), Perataan (*equity*), Responsivitas (*responsiveness*), Ketepatan (*appropriateness*) dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian evaluasi program angkutan cerdas sekolah (ACS) berbasis Aplikasi di Kabupaten Ponorogo dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam sugiono, 2011:46) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan pembahasan Evaluasi Program Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan teori Kriteria Evaluasi William Dunn. Ada 6 kriteria yang dikemukakan oleh William Dunn yang terdiri dari Efektivitas (*effectiveness*), Efisiensi (*efficiency*), Kecukupan (*adequacy*), Perataan (*equity*), Responsivitas (*responsiveness*), Ketepatan (*appropriateness*). Dan berikut ini penjelasannya:

1. Efektivitas (*effectiveness*)

Kriteria yang pertama adalah Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuannya dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas

teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Kriteria ini memiliki 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Masyarakat dan Realisasi Kebijakan.

Harapan masyarakat adalah saran, usulan dan keinginan masyarakat setempat atas pembangunan maupun hasil kebijakan yang dibuat. Sementara itu Realisasi kebijakan adalah “suatu perwujudan nyata yang dilakukan atas ditetapkannya suatu kebijakan upublik guna penyelenggaraan pemerintahan.

Hal yang hampir sama juga di kemukakan oleh Surya Shandra (2016:5) dalam penelitiannya yang berjudul evaluasi program bus sekolah di Kota Surabaya. “Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan. Efektifitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya”.

Program angkutan cerdas sekolah dalam pelaksanaannya sampai saat ini masih belum efektif. Kendala belum efektifnya program angkutan cerdas sekolah di Kabupaten Ponorogo di karenakan masih banyaknya pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor untuk beraktivitas ke sekekolah meskipun pelajar tersebut tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).

Sehingga kriteria efektifitas dalam Program angkuta cerdas sekolah (ACS) Berbasis Aplikasi di Kabupaten Ponorogo masih belum bisa di katankan efektif karena dalam hal ini pencapaian tujuan untuk pengurangan angka kecelakaan yang dilakukan oleh pelajar masih kurang, penekanan tingkat pelanggaran tertib kendaraan yang dilakukan pelajar dan pengurangan beban lalulintas padawaktu *peak* pagi juga masih belum tercapai sehingga dapat dikatakan dalam hal efektifitas belum tercapain.

2. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu.. Menurut Muchdoro (1997:180) “Efisiensi adalah tingkat kehematan dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Efisiensi terbagi menjadi dua, yaitu efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Efisiensi waktu adalah tingkat kehematan dalam hal waktu saat pelaksanaan. Sedangkan efisiensi biaya adalah tingkat kehematan dan pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan". Kang dkk (2015:3) dalam penelitiannya mengungkapkan pelaksanaan efisiensi berkenaan dengan dua hal yaitu pemborosan sumberdaya yang harus di tekan serta penggunaan ketepatan waktu yang di perlukan untuk sampai ke tujuan (*the times of window*), Oktavianus Wijaya (2015: 4) Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi. Sumber daya dapat ditinjau dari segi ekonomis dan segi teknologis. Secara ekonomis sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output.

Program angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi di Kabupaten Ponorogo sudah dapat dikatakan sudah baik dalam penggunaannya dari segi efisiensi, dikarenakan dalam hal kelompok sasaran sudah tepat yaitu seluruh pelajar di ponorogo, yang sebelumnya kelompok sasaran hanya terpaut pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di awal program ACS ini berjalan. tetapi dalam pelaksanaannya sekarang sudah mencakup semua kalangan pelajar baik tingkat dasar (SD) maupun sekolah menengah atas (SMA) dan sedrajat, selain itu juga dalam segi efisiensi ke tepatan waktu sudah baik di karenakan dalam pelaksanaannya prongram angkutan cerdas sekolah sudah menggunakan aplikasi sehingga estimasi waktu berangkat dan pulang sekolah sudah sesuai dengan jadwal dengan ketentuan waktu yang sudah di tetapkan yaitu pemberangkatan pada pukul 06.00 pada angkutan trayek dalam kecamatan, sedangkan trayek luar kecamatan berangkat

pada 05.30, sedangkan pada waktu penjeputan yaitu pukul 13.30 pada semua trayek, sehingga pelajar yang menaiki program angkutan cerdas sekolah pasti akan sampai tepat waktu di sekolah. Sedangkan dari efisiensi biaya operasional Program angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi ini sendiri di ambil dari dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Ponorogo sejumlah Rp.1.385.120.000 pada tahun 2018. Dana tersebut digunakan untuk biaya operasional armada angkutan cerdas sekolah, seperti, pembelian handphone android untuk para sopir, perawatan angkutan kendaraan, pemberian honorarium guru pendamping siswa pengguna ACS serta membayar gaji sopir yang berjumlah empat 42 orang.

3. Kecukupan (*adequacy*)

Selain efektif dan efisien, suatu kebijakan juga harus dipastikan cukup dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Menurut Dunn (2003:430) "kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah". Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan atau seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan suatu masalah. Menurut Oberli dkk (2008:1) Penghitungan penumpang adalah tugas penting untuk perencanaan dan operasi sistem transportasi publik yang cerdas. Hal ini dikarenakan dengan menghitung kapasitas penumpang kita dapat mengetahui seberapa jauh tingkat kecukupan serta keberhasilan sebuah transportasi umum, sehingga pada akhirnya program tersebut terlihat berjalan dengan efektif dan efisien.

Program angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi di Kabupaten Ponorogo masih kurang dari kata cukup dalam pelaksanaannya, meskipun dalam hal pembiayaan pengalokasian dana sudah dianggap cukup untuk pendanaan operasional serta pembayaran gaji sopir. Namun dalam pelaksanaannya masih dirasa tidak tercukupi, seperti belum adanya Standar Operasional Prosedur dari program angkutan cerdas sekolah tersebut sehingga tidak ada peraturan khusus dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo

sendiri yang mengatur kebijakan tentang layanan angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi seperti perbub (Peraturan bupati) atau Perda (Peraturan Daerah) tetapi hanya mengacu pada peraturan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan. Masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program angkutan cerdas sekolah tersebut seperti terbatasnya jumlah armada, dimana kapasitas 1 armada dapat mengangkut pelajar 12-13 orang dalam sekali angkut berarti dari 42 angkutan yang ada, armada tersebut hanya dapat mengangkut maksimal 546 siswa dalam sekali jalan, sedangkan jumlah pelajar di Kabupaten Ponorogo berjumlah 116.289 pelajar, sehingga dapat di simpulkan dalam pelaksanaannya masih dianggap kurang dari segi kapasitas. sebenarnya pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo akan melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dengan merencanakan penambahan armada angkutan cerdas sekolah berjumlah 60 unit, dengan penambahan anggaran senilai Rp 2 Milyar.

4. **Perataan (*equity*)**

Perataan berhubungan dengan keadilan distribusi hasil kebijakan kepada kelompok yang berbeda dalam masyarakat menurut Asyiah dkk (2017). Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijaksanaan yang akibatnya dan usahanya didistribusikan secara adil. Suatu kebijakan walaupun nantinya di distribusikan secara merata tetapi hasilnya tidak akan sepenuhnya dapat memuaskan-masyarakat sebagai penerima kebijakan, karena individu dan kelompok mempunyai nilai yang berbeda dalam hal kepuasan.

Sama halnya yang di paparkan oleh Surya Shandra (2016:6) dalam kajiannya kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin efektif, efisien dan mencukupi, namun mungkin ditolak karena menghasilkan distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata, hal ini terjadi karena mereka yang

membutuhkan tidak menerima pelayanan sesuai dengan jumlah mereka.

Sasaran dalam program kebijakan ini adalah para pelajar yang khususnya belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) untuk menggunakan kendaraan bermotor, tetapi dalam pencapaian sasaran belum maksimal karena dalam hal ini jumlah armada yang beroperasi dalam program angkutan cerdas sekolah belum mencukupi untuk menampung jumlah keseluruhan pelajar yang ada di Kabupaten Ponorogo, sehingga masih banyak pelajar di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Ponorogo belum bisa menikmati/belum bisa merasakan Program angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi ini.

5. **Responsivitas (*responsiveness*)**

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. kriteria ini penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Menurut Ghilman Fahmi (2017:7) Kepuasan dapat terbentuk berdasarkan perbandingan antara kualitas layanan yang diberikan dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pengguna layanan suatu program kebijakan. Menurut Sara Eguizabal dkk (2017:5) kepuasan atau ketidakpuasan pengguna suatu kebijakan sebagai respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian kinerja aktual program yang dipersepsikan setelah program terlaksana.

Program Angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi di Kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo mendapat tanggapan serta respon yang sangat baik dari para pengguna angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi tersebut yaitu khususnya para pelajar serta para wali murid, dikarenakan mereka merasa terbantu dengan adanya program angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi ini. contohnya seperti mereka tidak perlu merepotkan orang tua untuk mengantarkan ke sekolah, orang tuapun juga merasa tidak

kuatir bawasannya anaknya akan membolos karena angkutan ini pati sampai di sekolah, membantu menghemat biaya transportasi ke sekolah, para pelajar juga merasa aman dan nyaman serta mereka juga tidak akan merasa takut akan terlambat bila berangkat ke sekolah menggunakan angkutan cerdas sekolah ini. sehingga para pelajar berharap bahwa program ini dilaksanakan lebih baik kedepannya, sehingga lebih maksimal. Respon yang baik juga datang dari Tingkat Provinsi Jawa Timur karena program ini meraih penghargaan sebagai “Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Tingkat Jawa Timur 2018 kategori Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien dan Berkinerja Tinggi.



Sumber : <https://ponorogo.go.id>

6. Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan berhubungan erat dengan rasionalitas substantif karena pertanyaan ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga diri dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan kebijakan program tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

Pelaksanaan program angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi di Kabupaten Ponorogo sudah mengikuti landasan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan angkutan yaitu Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari

sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan. Program angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi dinilai juga sudah tepat sasaran, dimana yang menjadi sasaran utamanya adalah para pelajar di Kabupaten Ponorogo hanya saja dalam prosesnya kurang maksimal. Fasilitas dari program bus sekolah di Kabupaten Ponorogo ini hanya memiliki empat puluh dua unit armada namun dalam hal fasilitas ada beberapa angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi ini yang memiliki taman baca, disini di bilang taman baca maksudnya adalah angkutan yang memiliki beberapa buku untuk di baca pada waktu mereka naik angkutan cerdas sekolah ini, selain itu mereka juga dapat meminjam buku-buku yang tersedia di dalam beberapa angkutan tersebut, tetapi hal ini sangat di sayangkan karena cuma ada beberapa yang memiliki fasilitas seperti itu tidak semua angkutan memilikinya.

PENUTUP Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang evaluasi program Angkutan Cerdas Sekolah di Kabupaten Ponorogo, dapat ditarik kesimpulan bahwa program Angkutan Cerdas Sekolah di Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Program tersebut masih banyak kekurangan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Adapun uraian singkat terkait enam kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn berikut ini.

Kriteria pertama yaitu efektivitas dalam pelaksanaannya masih dibilang belum efektif secara maksimal, Kendala belum efektifnya program angkutan cerdas sekolah di Kabupaten Ponorogo tersebut adalah dikarenakan dalam hal untuk pencapaian tujuan mengurangi angka kecelakaan yang dilakukan oleh pelajar masih kurang. tahap kriteria efisiensi sudah dikatakan terpenuhi dikarenakan dalam hal kelompok sasaran sudah tepat, dari segi ketepatan waktu sudah sangat baik dikarenakan angkutan cerdas sekolah sudah menggunakan aplikasi sehingga dalam hal pemberangkatan dan penjemputan sangat tepat waktu. Biaya yang digunakan untuk operasional armada angkutan cerdas sekolah juga sudah tercukupi, dana yang digunakan untuk operasional angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi berasal

dari dana (DAU) Kabupaten Ponorogo. Pada tahap kriteria kecukupan masih belum terpenuhi, karena dalam program angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi di Kabupaten Ponorogo tidak ada Standar Operasional Prosedur tentang layanan angkutan cerdas sekolah sehingga tidak ada peraturan khusus dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri yang mengatur kebijakan tentang layanan angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi. tahap kriteria perataan dalam pelaksanaannya masih belum merata ke semua sekolah yang ada di Kabupaten Ponorogo. karena dalam hal jumlah armada yang ber operasi dalam program angkutan cerdas sekolah sangat terbatas belum bisa mencukupi untuk menampung jumlah keseluruhan pelajar yang ada di Kabupaten Ponorogo. Pada tahap kriteria responsivitas bahwa program angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi mendapat tanggapan serta respon yang sangat baik oleh para pelajar pengguna angkutan sekolah serta juga mendapatkan penghargaan dari Tingkat Provinsi Jawa Timur sebagai “Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Tingkat Jawa Timur 2018. Pada tahap terakhir yaitu kriteria ketepatan Program angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi dinilai juga sudah tepat sasaran, dimana yang menjadi sasaran utamanya adalah para pelajar di Kabupaten Ponorogo hanya saja dalam prosesnya kurang maksimal.

Saran

Bedasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan pelaksanaan Program angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi di Kabupaten Ponorogo khususnya dalam rangka mencapai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Dalam kecukupan program Program angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi terkendala akan keterbatasnya Armada angkutan cerdas sekolah, diharapkan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dapat segera melakukan usaha-usaha dalam penambahan armada program angkutan cerdas sekolah ini agar pelaksanaan yang selama ini masih terbatas karena kurangnya armada dapat segera teratasi sehingga angkutan cerdas sekolah bisa mengangkut lebih banyak pelajar lagi di Kabupaten Ponorogo. Selain usaha penambahan armada angkutan cerdas sekolah, perlu adanya penambahan fasilitas taman baca pada setiap armada angkutan cerdas sekolah, karena taman baca ini hanya bisa di nikmati oleh beberpa rute yang memang hanya tersedia di beberapa armada angkutan saja,

sehingga dengan penambahan taman baca ini seluruh penumpang armada angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi dapat menikmati tanpa ada yang terkecuali.

2. Diharapkan kedepannya angkutan cerdas sekolah juga menambah fungsi dari angkutan ini, sehingga tidak hanya di gunakan untuk berangkat dan pulang sekolah saja melainkan juga untuk memberikan layanan transportasi keperluan sekolah, semisal sekolah mengadakan acara yang berkenaan dengan hal pendidikan , serta lebih meningkatkan kerja sama antara dinas pehubungan dengan dinas pendidikan supaya dalam penentuan rute atau keperluan mengenai pendidikan dapat lebih efektif dan efisien, selain itu juga harus ada kerja sama dengan kepolisian sehingga program angkutan cerdas sekolah mendapatkan prioritas ke amanan di jalan.
3. Program angkutan cerdas sekolah Perlu dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga dapat menunjang kinerja layanan angkutan cerdas sekolah (ACS) berbasis aplikasi serta memperjelas landasan hukum dari program angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi ini sehingga lebih kuat, karena selama prosesnya masih kurang maksimal dalam pelaksanaan peraturannya.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

- a. Seluruh dosen S1 Administrasi Negara FISH Unesa.
- b. Dr Weni Rosdiana S.Sos., M.AP selaku dosen Pembimbing
- c. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis sampai terselesaikan skripsi ini.
- d. Deby Febriyan Eprilianto, S.sos., M.PA. selaku dosen penguji.
- e. Serta pihak yang ikut andil dalam Penyusunan Skripsi

DAFTAR PUSTAKA

- Al Akbar Fahmi Ghilman, 2017. *Layanan Transportasi gratis dan Kepuasan Siswa Sma Negeri Se-Kota Mojokerto*: Universitas Negeri Malang.

- Ardhya Kusuma Oktavianda Wijaya, 2015. *Evaluasi program Bus Sekolah di Kota Surabaya*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safarudin Abdul. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Buku Pedoman Operasional Angkutan Cerdas Sekolah (ACS). 2017
- Eprilianto, Sari dan Saputra. 2019. *Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 4, No. (1):30– 37.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eguizábal, Berodia, Portilla and Ponce 2017. *Optimization model for school transportation design based on economic and social efficiency*. DOI: doi.org/10.1016/j.tranpol.2018.01.015
- Heelan, Combs, Abbey, Burger and Bartee 2013 *Evaluation of School Transportation Patterns and the Associated Impact on BMI in 2 Midwestern Communities*. DOI:doi.org/10.1123/jpah.10.5.632.
- Polda Jatim <https://berita-jawa-timur/d-4834088/2019-angka-kecelakaan-di-jatim-turun-1759-pelanggaran-12-juta-kasus> (diakses 05 Januari 2020)
- Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo. <https://kabponorogo.jdih.jatimprov.go.id> (diakses 05 Januari 2020)
- I Gusti Angga Putra Agung Bagus, 2016. *Studi Evaluasi Program Bus Trans Sarbagita Pemerintah Provinsi Bali* Universitas Airlangga.
- Ilham Muhammad, 2019. *Evaluasi Pelaksanaan Program Bus Sekolah Gratis Oleh Uptd Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*. Scholar, e-ISSN: 2655-0865.
- Kang, Kin, Felan, Choi and Cho 2015. *Development of a Genetic Algorithm for the School Bus Routing Problem*. International Journal of Software Engineering and Its Applications, DOI:dx.doi.org/10.14257/ijsei.a.2015.9.5.11.
- Oberli, Torriti and Landau 2008. *Performance Evaluation of UHF RFID Technologies for Real-Time Passenger Tracking in Intelligent Public Transportation System*. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems* DOI: 10.1109/TITS.2010.2048429.
- Raoniari, Rao and Velmurugan 2016. *Public Transport Performance Evaluation Techniques-AReview*. <https://www.researchgate.net/publication/305992592>.
- Setiawan Surya Shandra, (2016). *Evaluasi program Bus Sekolah di Kota Surabaya*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Asyiah, Adnan dan Mubarak. 2017. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 2, No (1): 01– 9
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Widodo, Djoko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Banyumedia Publishing.